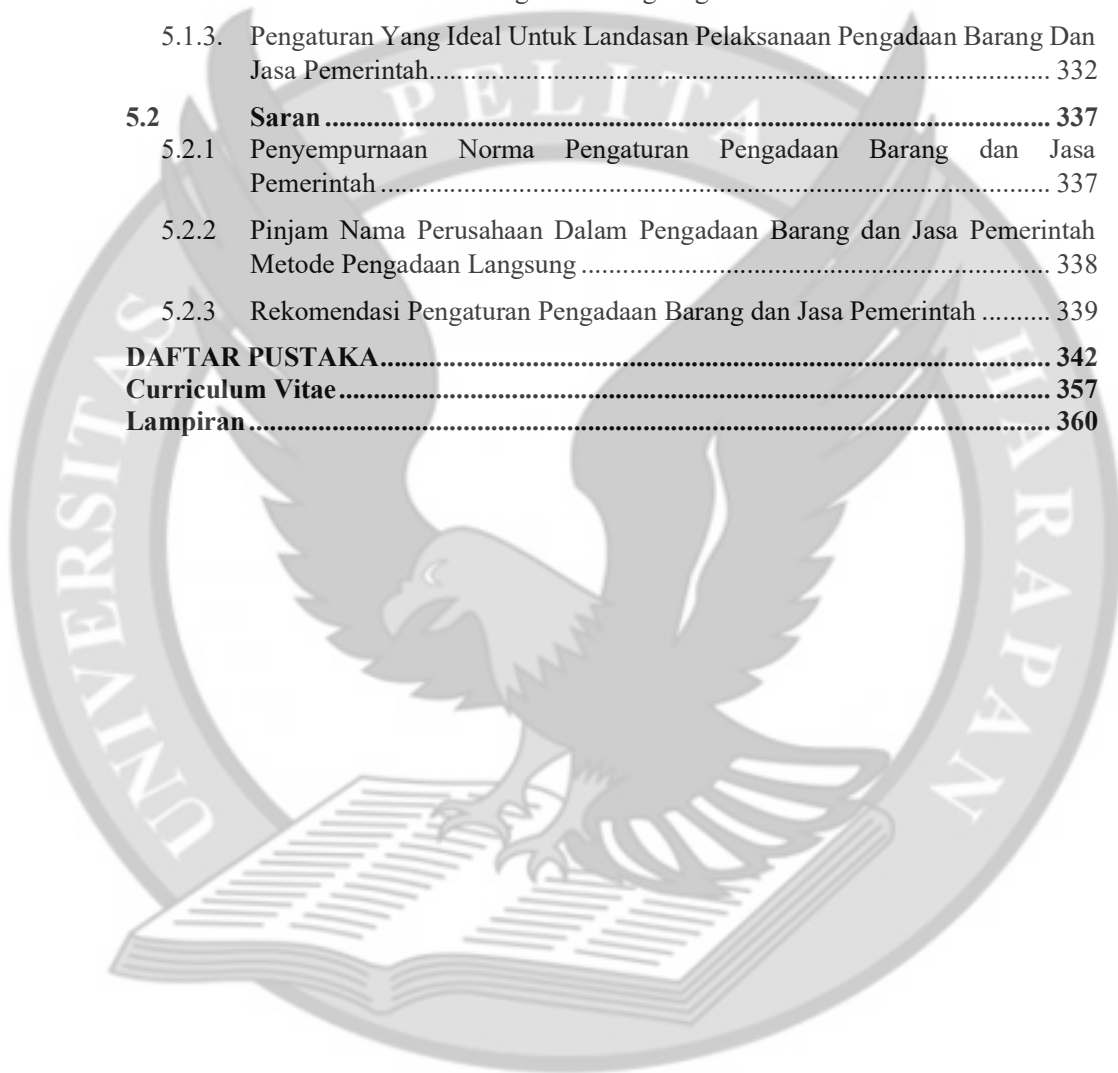


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	33
1.3 Tujuan Penelitian.....	33
1.4 Kegunaan Penelitian.....	34
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	34
1.4.2. Kegunaan Praktis	34
1.5 Orisinalitas Penelitian	35
1.6 Sistematika Penulisan.....	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	43
2.1 Landasan Teori	43
2.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	45
2.2.1. Teori Efektivitas Hukum	53
2.3.1. Teori Keadilan Bermartabat.....	56
2.2 Landasan Konseptual.....	75
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	94
3.1. Jenis Penelitian.....	94
3.2. Objek kajian penelitian	96
3.3. Pendekatan Penelitian	97
3.4. Jenis Data.....	98
3.5. Lokasi dan objek Penelitian.....	101
3.6. Prosedur dan Tahapan Pengumpulan Data.....	101
3.7. Pengolahan dan Analisis Data	105
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	107
4.1. Prinsip-Prinsip Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	107
4.1.1. Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	107
4.1.1.1. Norma-Norma Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	107
4.1.1.2. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	109
4.1.1.3. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	115
4.1.1.4. Etika Pengadaan Barang dan Jasa	115
4.1.2. Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	119
4.1.2.1. Aspek Hukum Administrasi Negara (HAN)	122
4.1.2.2. Aspek Hukum Perdata.....	126
4.1.2.3. Aspek Hukum Pidana.....	130
4.1.3. Pinjam Nama Perusahaan Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .	137
4.1.4. Metode Pengadaan Langsung Barang dan Jasa Pemerintah	153

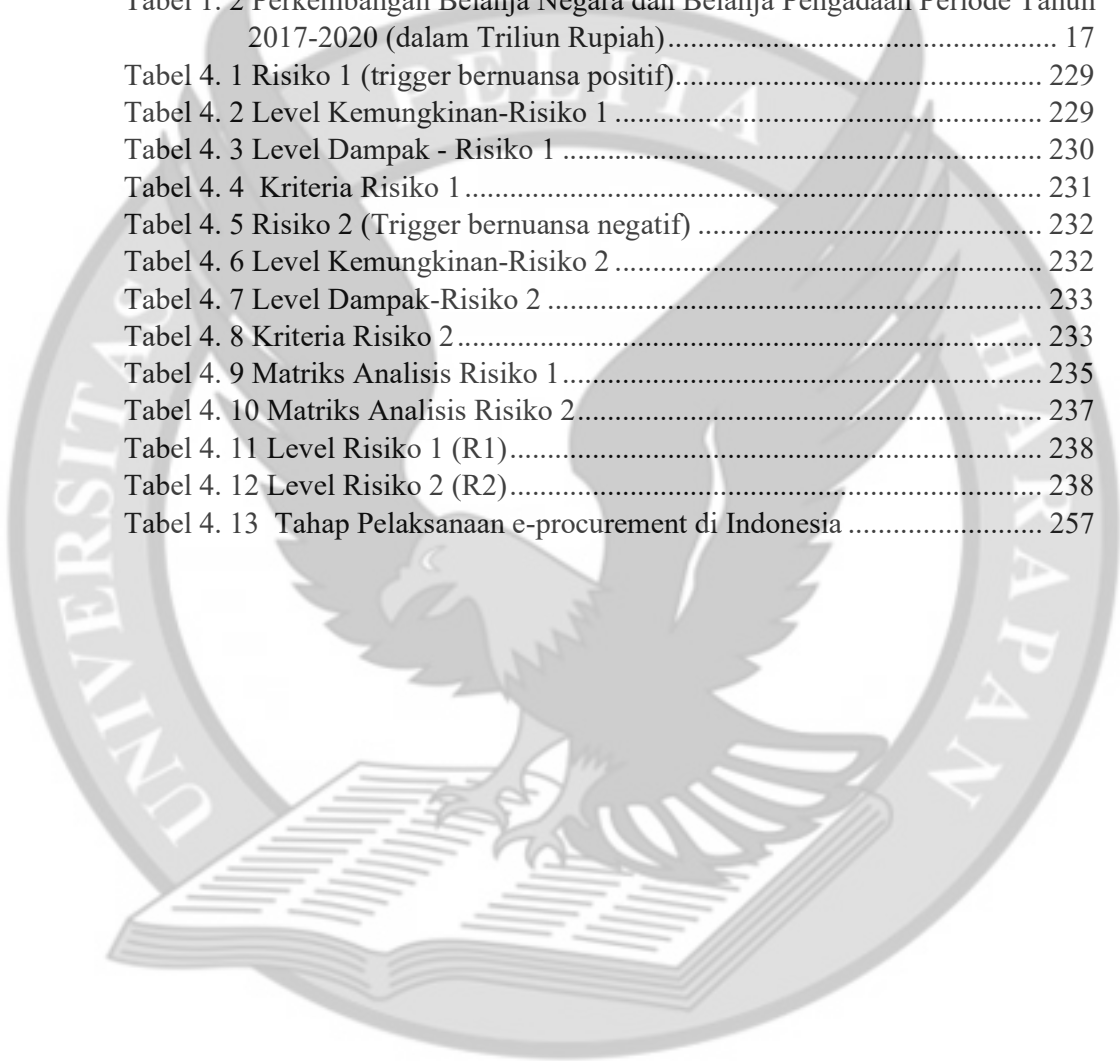
4.1.4.1.	Karakteristik dan Lingkup Pengadaan Langsung.....	153
4.1.4.2.	Prosedur Pengadaan Langsung	164
4.1.5.	Analisis Keadilan Bermartabat atas Prinsip-prinsip dan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	173
4.1.6.	Analisis Kepastian Hukum Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	189
4.1.7.	Ringkasan Hasil Kajian Yuridis Normatif.....	192
4.2.	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Metode Pengadaan Langsung Berdasarkan Pinjam Nama Perusahaan.....	195
4.2.1.	Praktik Pinjam Nama Perusahaan Pada Pengadaan Langsung	195
4.2.2.	Beberapa Putusan Pengadilan Terkait Praktik Pinjam Nama Perusahaan .	199
4.2.2.1.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2356 K /Pid.Sus/2011	199
4.2.2.2.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pdt.Sus-KPPU/2015	205
4.2.2.3.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 K/Pid.Sus/2016.....	208
4.2.2.4.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2757 K/Pid.Sus/2017	214
4.2.3.	Mengungkap Praktik Pinjam Nama Perusahaan dengan Pendekatan Manajemen Risiko	220
4.2.3.1.	Identifikasi Risiko	227
4.2.3.2.	Analisis Risiko	235
4.2.3.3.	Evaluasi Risiko.....	242
4.2.3.4.	Penanganan Risiko	243
4.2.4.	Perbandingan Pengadaan Barang dan Jasa di Negara Lain	249
4.2.5.	Pengembangan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik di Indonesia...	255
4.2.6.	Analisis Keadilan Bermartabat dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	266
4.2.7.	Analisis Kepastian Hukum dalam Praktik Pinjam Nama Perusahaan	275
4.2.8.	Temuan Penelitian Yuridis Empiris.....	276
4.3.	Pengaturan Yang Ideal Untuk Landasan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	298
4.3.1.	Permasalahan Hukum dalam Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	298
4.3.1.1.	Tujuan Pengadaan dan Penegakan Hukum	298
4.3.1.2.	Disharmoni Peraturan Teknis.....	302
4.3.1.3.	Dampak bagi para Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ..	308
4.3.2.	Ketidakefektifan Implementasi Regulasi Saat Ini.....	310
4.3.2.1.	Faktor Instrumental	310
4.3.2.2.	Faktor Institusional.....	312
4.3.2.3.	Kebijakan Pengaturan Pengadaan Langsung yang Pro Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi	314
4.3.3.	Kebutuhan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa	316
4.3.3.1.	Penyempurnaan Substansi Peraturan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	316
4.3.3.2.	Penguatan Aspek Kelembagaan dan Unsur Sumber Daya Manusia ..	319

4.3.3.3. Langkah Penyempurnaan Regulasi Yang Ideal.....	320
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	326
5.1 Kesimpulan.....	326
5.1.1. Prinsip-prinsip Pengaturan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 326	
5.1.2. Praktik Pinjam Nama Perusahaan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Metode Pengadaan Langsung.....	330
5.1.3. Pengaturan Yang Ideal Untuk Landasan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.....	332
5.2 Saran.....	337
5.2.1 Penyempurnaan Norma Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	337
5.2.2 Pinjam Nama Perusahaan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Metode Pengadaan Langsung.....	338
5.2.3 Rekomendasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	339
DAFTAR PUSTAKA.....	342
Curriculum Vitae.....	357
Lampiran.....	360



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara	4
Tabel 1. 2 Perkembangan Belanja Negara dan Belanja Pengadaan Periode Tahun 2017-2020 (dalam Triliun Rupiah).....	17
Tabel 4. 1 Risiko 1 (trigger bernuansa positif).....	229
Tabel 4. 2 Level Kemungkinan-Risiko 1	229
Tabel 4. 3 Level Dampak - Risiko 1	230
Tabel 4. 4 Kriteria Risiko 1	231
Tabel 4. 5 Risiko 2 (Trigger bernuansa negatif)	232
Tabel 4. 6 Level Kemungkinan-Risiko 2	232
Tabel 4. 7 Level Dampak-Risiko 2	233
Tabel 4. 8 Kriteria Risiko 2	233
Tabel 4. 9 Matriks Analisis Risiko 1	235
Tabel 4. 10 Matriks Analisis Risiko 2.....	237
Tabel 4. 11 Level Risiko 1 (R1).....	238
Tabel 4. 12 Level Risiko 2 (R2).....	238
Tabel 4. 13 Tahap Pelaksanaan e-procurement di Indonesia	257



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Potensi Nilai Paket Pengadaan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Kecil.....	15
Gambar 1. 2 Tingkat partisipasi Pelaku Usaha Kecil dalam Pengadaan Pemerintah Secara Elektronik tahun 2008-2021.....	16
Gambar 1. 3 Nilai Transaksi Paket Pengadaan Pemerintah Secara Elektronik yang Dimenangkan Pelaku Usaha Kecil tahun 2021.....	16
Gambar 4. 1 Bagan Lingkup Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.....	121
Gambar 4. 2 Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Perbuatan Melawan Hukumnya.....	121
Gambar 4. 3 Pinjam Nama Perusahaan atas inisiatif Penyedia.....	139
Gambar 4. 4 Pinjam Nama Perusahaan atas inisiatif Aparat Pemerintah.....	144
Gambar 4. 5 Ilustrasi cara pengadaan langsung.....	166
Gambar 4. 6 Hubungan antara Prinsip Manajemen Risiko, framework, serta proses.....	224
Gambar 4. 7 Proses Manajemen Risiko.....	225
Gambar 4. 8 Kriteria dan Selera Risiko.....	234
Gambar 4. 9 Peta Risiko Pinjam Bendera.....	240

